

06/XI 11 April 1981 tempo

Islam fundamentalis ? di rumah kaum "fundamentalis"

Penafsiran islam fundamentalis dan gerakan islam fundamentalis di indonesia. sekilas tentang masjid istiqamah di bandung, dimana ada beberapa jamaahnya terlibat kejahatan. (ag)

BERKAT peristiwa pembajakan pesawat Garuda, akhir Maret lalu, Indonesia dapat nama. Bukan hanya dalam hal keberhasilan pasukan anti-teroris. Tapi juga karena Indonesia termasuk negara yang jadi ajang gerakan "Islam fundamentalis." Tetapi bagaimana bisa? Menurut penelitian sementara, tak ada kekuatan besar yang jadi majikan mereka. Nampaknya mereka hanya segelintir belia (jumlahnya beberapa ratus) pengikut seorang imam muda berumur 31 tahun, Imran bin Zein. Ceritanya bisa dimulai dari sebuah masjid di Bandung. Itulah Masjid Istiqamah -- terjemahannya: 'Masjid Sikap Lurus'. Belum lagi berusia dua dasawarsa, terletak di salah satu daerah elite, bangunan modern itu termasuk masjid yang khas masa mutakhir. Di sini berkumpul ratusan anak muda. Sebagai tempat yang digemari, mesjid ini barangkali hanya bisa ditandingi oleh Masjid Salman di kompleks Institut Teknologi Bandung. Ke situlah Imran yang asal Medan itu datang dari Jakarta pertama kalinya di tahun 1979. Ia diperkenalkan oleh Azhar, anak Kolonel Purnawirawan Cut Usman dari Cimahi. Imran memang hanya tiga kali berceramah di sini -- dan selalu sekitar tengah malam. Tapi nampaknya pengikutnya sebenarnya sudah lebih dulu ada di sekitar situ. Anggota baru di Istiqamah terhitung kecil: sekitar 30 orang dari 600 orang. Tapi militansi mereka segera dikenal. Apalagi setelah Februari 1981 yang lalu terjadi peristiwa penyerangan markas polisi di Cicendo, yang disebut-sebut dipimpin oleh Azhar, si anak pensiunan polisi Cimahi. Menurut keterangan resmi serangan yang membunuh tiga orang polisi ini dimaksudkan untuk membebaskan kawan mereka yang ditahan dan juga untuk cari senjata. Agak jauh sebelum itu pernah pecah perkelahian massal di sebuah pekuburan, juga di Cimahi -- akibat pertengkaran tentang bagaimana cara pemakaman yang "benar menurut Islam." Kemudian terjadi pula penusukan kepada dr.

Syamsuddin, anggota Yayasan Istiqamah dan ketua bidang pendidikan di situ. Tapi pasal pertama agaknya ialah penggerebakan alat negara ke masjid tersebut Agustus tahun lalu. Dari situ, 44 anak muda yang sedang mengikuti ceramah yang berapi-api -- penuh kutukan kepada para ulama dan pemerintah -- diangkut. Meskipun pengurus masjid sebenarnya sudah dibubarkan oleh pihak Yayasan Istiqamah, ceramah itu diberikan dalam rangka kaderisasi pemuda masjid. Pembicara: Machrizal dari Jakarta -- yang kemudian dikenal sebagai pemimpin pembajakan pesawat. Sudah jelas, baik Machrizal -- yang sudah mati itu -- maupun, Imran, bukan orang Istiqamah. Para jamaah masjid itu sendiri, yang penuh kegiatan -- dari acara ibu-ibu sampai anak-anak -- kepada TEMPO hanya menyesali bahwa masjid mereka "dirugikan". Suasananya memang jadi setengah tertutup, bahkan cukup banyak orang yang tak mau disebut nama maupun identitasnya. Kecuali di waktu-waktu shalat jamaah, orang asing yang datang akan diamati dari kejauhan: jangan-jangan ia pengikut Imran -- kalau bukan petugas negara. Tapi yang menarik, kedatangan Imran itu dahulu seperti sudah diharapkan --meski banyak orang kecewa kemudian. Mungkin itu disebabkan karena Masjid Istiqamah belum punya satu idola seperti Ir. Imaduddin dulu untuk Masjid Salman ITB. Bukhori, anggota Dewan Pemuda Senior Masjid Al Manar bisa menuturkan betapa Imran dahulu pada kedatangannya yang pertama diterima para pemuda masjid di Bandung -- termasuk dia sendiri. Waktu itu Imran belum minta diakui sebagai imam, dan di pertemuan itu hadir Ir. Bambang Pranggono, penggerak aktivitas pemuda Istiqamah, dr. Syamsuddin, dari bidang pendidikan masjid tersebut, di samping para pemuda Masjid Salman dan Istiqamah sendiri. Pertemuan itu tentunya disebabkan oleh terbukanya pintu masjid khususnya bagi siapa saja yang dikabarkan berjuang dalam da'wah. Tapi juga, setidaknya bagi sebagian mereka, ada kemungkinan karena orang Istiqamah memang sedang mencari bukan hanya idola, tapi juga imam. Dan ini adalah imam atau pemimpin agama -- bukan imam masjid atau imam salat. MUNGKIN kedengaran agak aneh. Tapi sebelum Imran datang, di Istiqamah sebenarnya sudah dibentuk Usrah. Ini (kata ini berarti: keluarga), semacam "anggota terpilih" dari seksi pemuda, waktu itu dipimpin oleh Bambang Pranggono. Sebuah sumber yang tak mau disebut namanya menyebutkan bahwa di tahun

1978 Usroh ini pernah maju kepada KH E.Z. Muttaqin, Ketua Majelis Ulama Ja-Bar dan anggota Yayasan Istiqamah, KH Rusyad Nurdin, juga sesepuh Istiqamah, dan ulama lain yakni KH Bustami Darwis -- untuk meminta kesediaan mereka sebagai imam agama. Ditolak, tentu saja. Bambang sendiri sebagai pemimpin, juga tak hendak menjadi imam. Ia bilang, ilmu agamanya "masih dangkal". Tetapi Bukhori juga bisa menuturkan sikap keras Usroh waktu itu. Misalnya pernah menganjurkan tidak menonton TV maupun radio, yang sedang dipenuhi maksiat. Juga menyarankan -- dengan keras -- agar para wanita menutup aurat. Malahan untuk itu juga memperingatkan para murid wanita SPG Negeri, yang tempatnya berdekatan dengan Istiqamah. Hasilnya bagus: gerakan ini makin lama makin banyak anggotanya, mencapai ratusan. Semuanya berkudung, sedap dipandang. Sayang, pernah terjadi konflik antara murid dan guru karena bersitegan soal pakaian. Di SMA Negeri III, sang gadis menuding gurunya "kafir" -- karena memaksanya memakai pakai seragam sekolah yang "terbuka" -- dan soal ini sampai diselesaikan oleh E.Z. Muttaqin. Sedang di SPG para/murid yang berkudung itu kemudian diberi kelas tersendiri. Miftah Faridl, seorang pengajar agama di Istiqamah dan Salman, selain dosen ITB, bisa juga menuturkan bagaimana sewaktu ia memberi kuliah dluha (habis subuh) ia mendapat surat. Isinya: pertanyaan apakah ia membayar zakat apakah hartanya halal dan kenapa istrinya tidak menutup aurat. Tapi hal-hal terakhir itu bukanlah soal yang pokok -- dibanding misalnya soal keimaman. Imran kemudian oleh sebagian remaja dibai'at sebagai imam, Juni 1980. Ada yang menyangka seolah Bambang Pranggono, pemborong yang sangat salih itu, pernah juga berbai'at. Tentu saja Bambang menolak. "Untuk apa saya mengikut dia," katanya. "Saya kan punya akal pikiran." Kepada TEMPO ia menegaskan: cara-cara yang ditempuh Imran tidak Islami sama sekali. "Masakan dalam agama tidak boleh bertanya -- padahal menambah keyakinan itu justru dengan tanya kalau perlu debat." Lebih lagi membunuh, teror dan sebagainya, "itu bukan cara Islam!" Bambang juga mengingatkan betapa dulu anak buah Imran memukuli para wanita pelacur di belakang Gedung Sate. Cara itu pun tidak Islami -- kata Bambang. Tapi yang menjadi pertanyaan ialah: mengapa mereka begitu ngebet mencari imam. Sedang kebanyakan umat muslimin

tidak. Kenyataan memang menunjukkan bahwa mereka yang menginginkan tegasnya soal imam itu (baik Islam Jama'ah, baik yang bernama Jama'ah Muslimin Hizbullah, atau pun kalangan yang mengagumi Abdullah Thufail di Surakarta dulu, konon), semuanya bukan orang yang berada di bawah kewibawaan satu organisasi keagamaan yang sudah mapan -- seperti Muhammadiyah, Persis, NU, Irsyad. Dan itu memang bisa menunjukkan ciri kalangan besar yang meramaikan masjid di masa-masa akhir ini. Mereka itu adalah anak-anak yang bukan dari keturunan santri -- yang di Jawa dikenal misalnya dengan istilah abangan. Plus mereka yang berada dalam kultur orga-nisasi "tanpa induk" seperti PII (Pelajar Islam Indonesia), salah satu ormas pelajar terbesar yang di masa Orde Lama terkenal militan. Bagi anak-anak Muhammadiyah maupun Persis, kiranya tak ada problem imam mereka adalah pemimpin mereka. Di sini imam fungsional sudah memenuhi kebutuhan akan "imam agama". Begitu pun bagi anak-anak pesantren dalam tradisi NU: KH Bisri Sjamsuri, atau rois lain, bahkan kadang "para keturunan", itulah semuanya. Mereka cukup mencium tangan Abdurrahman Wahid, misalnya, keturunan teras dalam NU dan aman. Tapi perbedaan lain juga ini: masalah keimaman sebenarnya tidak pernah dibicarakan dalam kelompok-kelompok yang lebih mapan itu. Lewat pembicaraan ribuan kitab fiqh dari abad ke abad, keimaman itu ternyata satu soal yang musykil, banyak diperdebatkan, dan kalau pun dianggap perlu, sebaiknya ditunda. Ada juga misalnya yang menganggap keimaman dalam Islam itu bukan orang melainkan lembaga. Hamka misalnya berpendapat begitu. Juga E.Z. Muttaqin. Dan keimaman itu pun bisa identik dengan pemerintah. Munculnya istilah waliyyul amnidl dlaruuriy bisy-syaukah, "pemegang perkara yang berkekuasaan penuh", di masa Soekarno dulu, menunjukkan kemungkinan itu -- walaupun ada yang menganggapnya salah, itu bukan dari sudut pengertian agama -- melainkan karena melihat orangnya, yakni Soekarno yang "abangan". Sebaliknya, kalangan pemuda yang idak berayah" adalah produk lingkungan baru: hasil dari pengajaran da'wah secara kilat (bahkan di sana-sini dibentuk "pesantren kilat") yang memang dak bisa diharap memberikan pengenalan keislaman secara mendalam dan kompleks. Apa yang mereka dapatkan malah sebuah kerangka pokok tentang Islam jelas batas pinggirnya, jelas umatnya

(yang dipahamkan sebagai benar-benar "satu") jelas pula imamnya. Juga PII misalnya, bukanlah ajang pengajaran agama. Mereka bisa merupakan anak-anak paling gigih "membela" Islam. Tapi tak jarang karena mereka memahami agama secara garis pokok. Bisa dimengerti bila kemudian mereka cepat-cepat merasa 'ada yang "kurang" pada pelaksanaan Islam'. Yakni imam. Dan, konsekuensinya, mereka relatif lebih mudah terpancing oleh provokasi. Temperamen itu boleh ditambah lagi oleh jenis persepsi ajaran yang berbeda dengan persepsi di kalangan anak-anak Muhammadiyah atau NU. Di Muhammadiyah, seorang anak terutama terikat untuk, katakanlah, memelihara ajaran yang bersih -- dari segala takhyul dan bid'ah. Di NU, seorang muda diberi tempaan untuk terutama mengurus kesalihan diri sendiri, demi 'keselamatannya di alam fana dan baka. Sedang dalam kelompok lepas ini, yang diberikan kepada mereka terutama adalah kepekaan akan posisi Islam di dunia dan Indonesia sekarang. Itu mungkin menumbuhkan sikap lebih dinamik. Atau keras. Atau juga kreatif, seperti banyak terbukti. Tetapi sikap itulah yang tidak selalu pas dengan kebutuhan maupun kemungkinan. Karena itu tidak hanya Tatang M. Natsir, bekas aktivis PII dan kini Sekjen Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPMI) yang menyarankan perlunya usaha pengubahan persepsi alias "indoktrinasi" itu. Kalangan PII misalnya, dulu menekankan program pada empat pokok akidah alias iman, jama'ah alias kesatuan umat, keimaman alias kepemimpinan, dan khittah alias garis perjuangan. Sudah sepantasnya itu diubah -- dan perubahan itu, yang dilaksanakan BKPMI, adalah: akidah yang dekat dengan da'wah, akhlak, penumbuhan intelek, dan penguasaan ketrampilan. Dengan itu para pemuda masjid memang diharap menjadi lebih damai -- meski mungkin memang baru harapan. Masalah-masalah yang "hangat," masalah-masalah seperti keimaman, atau kesatuan umat dan yang semacam, diusahakan diganti dengan usaha pembentukan kualitas pribadi. BKPMI sendiri organisasi baru: dibentuk baru pada 1977 di Masjid Istiqamah Bandung, oleh tokoh-tokoh seperti Toto Tasmara yang waktu itu jadi Ketua Umumnya, dan jangan lupa Bambang Pranggono yang jadi Seyen, di samping Anwar yang sekarang jadi Ketua umum. Bahwa dalam perjalanannya yang singkat telah terjadi perbenturan di dalam, terlihat pula. Misalnya remaja Masjid Al Azhar Jakarta, di bawah Jimly Ash

Shiddieqy, tidak bersedia bergabung pada periode yang dulu yang dalam anggapan mereka mungkin "politis". Memang tak begitu aneh bila sebagian remaja agak "tak suka politik". Anwar misalnya, yang jadi Ketua Umum untuk periode 1401-1404 Hijri (1980-1983), menyebut hal yang dianggapnya contoh persepsi keagamaan yang bersemangat politik praktis -- dulu. Misalnya: BKPMI pernah membuat pernyataan tentang Afghanistan. Bahkan tentang Kebatinan, di tahun 1978. "Itulah antara lain yang menyebabkan adanya tuduhan BKPMI ini politis," kata sarjana da'wah IAIN Jakarta itu. Meskipun, "tidak berarti studi politik terlarang bagi kami." Sebaliknya pernyataan yang dianggap pantas diedarkan oleh sebuah perkumpulan remaja masjid, adalah seperti yang misalnya terdapat dalam edaran-edaran BKPMI beberapa waktu lalu -- yang isinya seruan agar anggota mereka menghindarkan diri dari kelompok Imran dan sebangsanya. Belum bisa diramalkan tentunya, benarkah wadah ini akan efektif. Toh mereka optimistis: dengan jumlah anggota lebih dari 2.000 organisasi remaja masjid, yang segera akan mereka adakan dalam waktu dekat misalnya kursus kader koperasi dan wiraswasta. Dalam bahasa Tatang, sang Sekjen, yang seharusnya ditekankan bagi remaja masjid memang bukan 'kerangka Islam'. Melainkan "nilai-nilai Islam yang harus diamalkan dan diwujudkan dalam wadah apa saja." Syukurlah kalau itu tidak terlalu muluk. Mereka tampaknya memang sadar, seperti dikatakan Tatang lagi, "sebenarnya tidak ada apa-apa, kalau tidak ada pancingan". Namun mereka juga mengerti perlunya menyiapkan ikan-ikan yang tak lagi gampang dipancing.

Pasang Surut Islam Indonesia

Kaleidoskop seabad (1900-1999) dinamika umat Islam Indonesia. Ajang muhasabah sekaligus pijakan menjayakan Islam di masa depan.

17 Juli 1905 Al-Jamiat al-Khairiyah, yang lebih dikenal dengan nama Jamiat Khair, didirikan di Jakarta. Organisasi ini terbuka untuk setiap Muslim tanpa diskriminasi asal-usul, tetapi mayoritas anggota-anggotanya adalah orang keturunan Arab. Bidang yang digarap pertama kali adalah mendirikan sekolah dasar dan

mengirimkan anak-anak muda ke Turki untuk melanjutkan pelajaran. Menurut Deliar Noer, ketika itu Jamiat Khair telah menjadi sebuah organisasi modern dalam masyarakat Islam. Organisasi mereka telah dilengkapi dengan anggaran dasar, daftar anggota yang tercatat serta rapat-rapat berkala. Sekolah yang mereka dirikan pun sudah menggunakan kelas-kelas, bangku, papan tulis serta dilengkapi dengan kurikulum. Pelajaran yang disampaikan pun tidak melulu ilmu agama, tetapi juga meliputi berhitung, sejarah dan ilmu bumi.

Yang menarik, bahasa perantara di antara mereka adalah bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, karena lingua franca di kalangan anak-anak Arab di Indonesia adalah bahasa Melayu atau bahasa daerah tempat mereka tinggal. Apalagi di sekolah itu juga ada murid-murid anak pribumi Indonesia. Bahasa Belanda tidak diajarkan, sebagai gantinya bahasa Inggris merupakan bahasa wajib.

16 Oktober 1905 berdiri Serikat Dagang Islam (SDI) yang diprakarsai oleh KH Samanhoeddi. Didirikan oleh para pedagang batik pribumi di Solo sebagai reaksi dari ulah para pedagang Tionghoa yang memandang rendah pedagang pribumi.

11 November 1912 SDI berubah menjadi Serikat Islam (SI) setelah Haji Oemar Said Tjokroaminoto, seorang berpendidikan pada jaman itu ikut bergabung dengan SDI atas ajakan H Samanhudi. Dalam kongresnya di Surabaya bulan Januari 1913 ditetapkan bahwa kegiatan SI bersifat menyeluruh untuk segenap pelosok tanah air.

Perubahan nama itu juga berimplikasi pada perubahan titik tekan pada aktivitas SDI/SI dari ekonomi ke politik. Pada tahun itu juga Sarekat Islam adalah satu-satunya gerakan politik nasionalis Indonesia. Boedi Oetomo yang lahir tahun 1908 bukanlah gerakan politik dan bukan Indonesia melainkan hanya priyayi Jawa saja. Dalam waktu singkat SI menjadi gerakan politik terbesar di Indonesia dan menjadi sumber inspirasi buat gerakan-gerakan nasionalisme Indonesia sesudahnya.

18 November 1912 di Yogyakarta berdirilah salah satu organisasi sosial Islam yang terpenting di Indonesia hingga saat ini, yakni Muhammadiyah. Didirikan oleh KH Ahmad Dahlan atas saran yang diajukan murid-muridnya dan beberapa anggota Boedi Oetomo.

Organisasi ini mempunyai maksud “menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad saw kepada penduduk bumiputera” dan “memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya”.

Muhammadiyah sangat gencar melakukan amar ma'ruf nahi munkar terutama memberantas praktek-praktek keagamaan masyarakat saat itu yang menurut Muhammadiyah penuh penyimpangan. Slogan mereka yang terkenal yaitu memberantas TBC (tachayul, bid'ah, churafat).

Muhammadiyah juga lahir sebagai reaksi terhadap misi dan zending yang semakin gencar setelah politik etis. Muhammadiyah lahir sebagai saingan misi dan zending dengan menggunakan sarana-sarana yang sama seperti sekolah dan balai-balai kesehatan yang kemudian menjadi rumah sakit Muhammadiyah.

11 Agustus 1915 di Jakarta berdiri organisasi Al Irsyad. Organisasi ini muncul karena pada tahun-tahun sebelumnya sering terjadi pertentangan antara golongan sayid (mengklaim sebagai keturunan Ali ra) dan bukan sayid antar sesama keturunan Arab dalam tubuh Jamiat Khair. Mereka yang bukan sayid kemudian mendirikan Jam'iyat al-Islam wal-Ersyad al-Arabia yang disingkat Al-Irsyad.

Para pendiri Al-Irsyad kebanyakan adalah pedagang. Tokoh yang sangat dihormati di kalangan pendiri dan kerap dimintakan fatwanya adalah Syaikh Ahmad Soorkatti, ulama asal Sudan yang datang ke Jakarta tahun 1911.

Al-Irsyad menekankan perhatian pada bidang pendidikan, terutama pada masyarakat keturunan Arab, meski masyarakat pribumi Indonesia ada juga yang menjadi anggotanya. Kemudian Al-Irsyad meluaskan perhatian mereka pada persoalan-persoalan kompleks, yang mencakup persoalan ummat Islam umumnya di Indonesia.

12 September 1923 di Bandung berdirilah organisasi modernis Islam Persatuan Islam (Persis). Organisasi ini berdiri dalam sebuah kenduri pengajian tiga keluarga keturunan Palembang yang sudah lama menetap di Bandung. Pelopornya adalah Haji Zamzam (1894-1952) dan Haji Muhammad Yunus. Dalam Anggaran Dasarnya disebutkan, bertujuan berusaha menyempurnakan kehidupan keagamaan berdasarkan ajaran agama Islam dalam arti yang seluas-luasnya.

Kini seiring dengan waktu organisasi ini tidak lagi melakukan gebrakan yang bersifat shock therapy tetapi cenderung ke arah low profile yang bersifat persuasif edukatif. Dua orang anggotanya yang sangat terkenal adalah Ahmad Hasan —yang lebih dikenal sebagai Hasan Bandung— dan Mohammad Natsir.

23 September 1925 berdiri Jong Islamieten Bond (JIB) di Jakarta. Sjamsuridjal bersama Mohammad Roem dan Kasman Singodimedjo adalah pengurus dan aktivis Jong Java. Tapi lantaran di organisasi itu aspirasi keislaman mereka tidak dikehendaki sebagian anggota lain non-Muslim dan sekuler, maka Ketua Jong Java Sjamsuridjal meletakkan jabatan, lalu bersama sahabatnya mendirikan JIB.

JIB memiliki divisi perempuan yang bernama Jong Islamieten Bond Dames (JIBDA) serta organisasi kepanduan bernama Nationaal Indonesische Padvinderij (Natipij) yang dikomandani oleh Kasman Singodimedjo. JIB juga membentuk sebuah Lembaga Inti (Kern Lichaam) yang anggotanya terdiri dari mereka yang telah banyak mengetahui tentang Islam. Di antaranya yang menonjol adalah pemuda Mohammad Natsir. Dalam hal publikasi JIB memiliki majalah organisasi bernama Het Lich (An Nuur).

Bersama sejumlah organisasi kepemudaan lain JIB berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kongres Pemuda II 27-28 Oktober 1928 di Jakarta yang menghasilkan Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoedi Indonesia atau terkenal kemudian dengan nama Sumpah Pemuda.

31 Januari 1926 di Surabaya, didirikanlah organisasi keislaman yang berbasis massa pesantren dengan pemikiran yang tradisional, yaitu Nahdlatul Ulama (kebangkitan ulama).

Pada masa itu perkembangan paham keagamaan di dalam negeri sering timbul pertentangan pendapat antara kaum tradisional dengan kaum modernis Islam. Pada saat kongres Al Islam (IV dan V), yang diselenggarakan di Yogyakarta dan Bandung untuk mencari input dalam menghadapi kongres Islam di Makkah, aspirasi kalangan pesantren sama sekali tidak tertampung. Karena materi usulan yang disampaikan KHA Wahab Hasbullah itu tidak masuk dalam agenda kongres Al-Islam di Indonesia, akhirnya atas prakarsa beliau pula para ulama pesantren mendirikan "Komite Hijaz". Komite ini dibentuk bertujuan untuk menyampaikan aspirasi ulama pesantren kepada penguasa Arab Saudi agar tradisi bermadzhah tetap diberi kebebasan. Misi komite ini berhasil dan diterima oleh penguasa Arab Saudi, Ibnu Saud. Setelah berhasil misinya, komite ini hendak membubarkan diri, namun KH Hasyim Asy'ari mencegahnya, justru menyarankan momentum ini dijadikan sebagai awal kebangkitan ulama. Maka, atas saran beliaulah pada tanggal 31 Januari 1926, di

Surabaya didirikanlah organisasi Nahdlatul Ulama (NU).

21 September 1937 berdiri Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), yang merupakan federasi organisasi sosial Islam se-Indonesia. Para tokoh gerakan Islam ini adalah KH Mas Mansur dari Muhammadiyah, KH Muhammad Dahlan dan KHA Wahab Hasbullah dari NU serta Wondoamiseno dari SI. Tujuan utama organisasi ini adalah sebagai tempat bermusyawarah dan saling mengenal yang diharapkan dapat mewujudkan pergerakan Islam lahir maupun batin, mempererat persatuan kaum muslimin di dunia dan khususnya di Indonesia.

Umumnya pembentukan MIAI ini disambut dengan baik oleh organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Jumlah anggotanya pun bertambah, dari 7 organisasi pada tahun 1937 menjadi 21 organisasi pada tahun 1941. Kongres Al-Islam pertama yang diadakan oleh MIAI diselenggarakan di Surabaya tanggal 26 Februari sampai 1 Maret 1938.

Pada bulan Oktober 1943, MIAI berganti nama menjadi Majelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi).

9 April 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai realisasi janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dari 68 anggota, hanya 15 orang saja yang benar-benar mewakili aspirasi politik golongan Islam, seperti KH Mas Masjkur, KH Wachid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Mudzakkir dan H Agus Salim. Dalam kelompok ini pihak Islam modernis dan Islam konservatif bersatu memperjuangkan dasar negara Islam.

Sebagian besar anggota BPUPKI adalah dari kalangan nasionalis sekuler yang tegas-tegas menolak Islam sebagai dasar negara. Mereka terdiri dari antara lain Radjiman Wediodiningrat, Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin serta Prof Supomo. Terjadi perdebatan seru antara kedua kelompok ini. Tetapi akhirnya kelompok Islam mengalah setelah dicapai kompromi dalam bentuk Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945.

17 Agustus 1945 Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Keesokan harinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memilih Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pertama serta mengesahkan Undang-undang Dasar

Negara RI.

14 November 1945 Presiden Soekarno mengangkat Sjahrir sebagai Perdana Menteri (PM) pertama kabinet parlementer. Meski bertentangan dengan UUD yang hanya memuat aturan kabinet presidensiil, praktek tersebut dijalankan dengan alasan untuk memudahkan perundingan dengan Belanda.

3 November 1945 atas saran Badan Pekerja KNIP, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat Pemerintah No X yang mengizinkan dan mendorong rakyat mendirikan partai-partai politik. Maklumat ini disambut banyak pihak, termasuk kalangan Islam.

8 November 1945 menyambut Maklumat Wakil Presiden, para tokoh Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) di Yogyakarta bersepakat mendirikan sebuah partai yang mewadahi segenap kekuatan Islam, bernama Partai Politik Islam Indonesia Masjumi yang selanjutnya populer dengan nama Partai Masjumi.

7-8 November 1945 berlangsung Kongres Ummat Islam I di Yogyakarta yang menghasilkan kesepakatan pembentukan satu-satunya partai politik Islam di Indonesia, bernama Partai Masjumi. Ketua pertamanya Dr Soekiman. Dalam anggaran dasarnya tertulis jelas tujuan partai ini: “terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan negara Republik Indonesia, menuju keridhaan Ilahi.” Status sebagai satu-satunya partai politik Islam di Indonesia mulai rontok ketika pada bulan Juli 1945 unsur PSII meninggalkan Masjumi dan menyatakan dirinya kembali sebagai partai politik independen, kemudian disusul oleh Nahdhatul Ulama yang melalui kongresnya di Palembang tahun 1952 mengubah dirinya dari sebuah gerakan sosial keagamaan menjadi partai politik yang berdiri sendiri.

5 Februari 1947 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) didirikan di Yogyakarta, oleh beberapa tokoh Islam yang diprakasai oleh Lafran Pane. Lafran dan kawan-kawannya melihat betapa perlunya memberi nafas keislaman bagi mahasiswa-mahasiswa Muslim, agar mahasiswa kelak tidak menjadi intelektual yang jauh dari agama. Sejak itu HMI menyebar di berbagai kampus di tanah air. HMI sempat menjadi organisasi pemuda sangat berpengaruh ketika bersama organisasi mahasiswa dan pelajar lain berperan sebagai gerakan oposisi terhadap pemerintahan Soekarno yang saat itu sangat dekat dengan PKI.

19 Desember 1948 Atas amanat Presiden dan Wakil Presiden dari Yogyakarta, Sjafrudin Prawiranegara membentuk pemerintah darurat yang kemudian disebut Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, serta membentuk kabinet sementara. Tokoh Partai Masjumi ini sendiri menjabat sebagai ketua kabinet merangkap sebagai Menteri Pertahanan, Penerangan dan Urusan Luar Negeri. Sjafrudin Prawiranegara dibantu oleh enam orang anggota kabinet dari berbagai partai. Pemerintahannya ini berakhir tanggal 13 Juli 1949 setelah Soekarno dan Hatta dibebaskan Belanda.

14 Desember 1949 dilakukan pertemuan untuk permusyawaratan federal di Jalan Pegangsaan 56 Jakarta yang dihadiri perwakilan Pemerintah RI dan Pemerintah Negara-negara atau Daerah untuk menandatangani Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Keesokan harinya dilakukan pemilihan Presiden RIS yang kembali memilih Soekarno serta Perdana Menteri RIS Mohammad Hatta. RIS hanya berusia beberapa bulan. RIS bubar dan Indonesia kembali kepada bentuk negara kesatuan setelah tercapai Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950 setelah sebelumnya Natsir mengajukan mosi integral di parlemen.

7 Agustus 1949 di Malangbong, Tasikmalaya, sekali lagi secara resmi Sekarmaji Marijan Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Gerakan ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia, terutama Aceh, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

Oktober 1950 terjadi pemberontakan di Kalimantan yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar alias Haderi bin Umar, seorang bekas Letda TNI, yang menyatakan sebagai bagian dari DI di bawah pimpinan Kartosuwirjo. Gerakan ini berhasil dipadamkan pada akhir tahun 1959 dengan ditangkapnya Ibnu Hadjar.

Januari 1952 Abdul Qahar Muzakkar juga menyatakan daerah Sulawesi Selatan merupakan bagian dari NII yang dipimpin SM Kartosuwirjo. Sebelumnya, pada bulan Agustus 1951 ia dan pasukannya telah lari ke wilayah pegunungan untuk melancarkan perlawanan terbuka kepada TNI dan pemerintah Soekarno. Gerakan perlawanan ini baru terhenti setelah Qahar diberitakan telah mati ditembak TNI pada bulan Februari 1965.

April 1952 NU menyatakan keluar dari Partai Masyumi dan menjadi

parpol tersendiri. Keluarnya NU ini karena perebutan kursi Menteri Agama antara kelompok Muhammadiyah dan NU. Adanya pelbagai kritik terhadap kebijaksanaan Wahid Hasyim menyebabkan terpilihnya pemimpin Muhammadiyah Faqih Usman sebagai Menteri Agama, sedangkan kalangan NU tetap menuntut jabatan ini untuk Wahid Hasyim.

20 September 1953 juga terjadi perlawanan DI/TII di Aceh, di bawah pimpinan Tengku Daud Beureueh. Perlawanan ini diawali dengan pernyataan Daud Beureueh bahwa Aceh merupakan bagian dari NII di bawah pimpinan SM Kartosuwirjo. Perlawanan ini baru dapat dipadamkan dengan dilakukannya Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh pada bulan Desember 1962.

29 September 1955 sebanyak 39 juta rakyat Indonesia datang ke tempat pemungutan suara untuk memilih anggota DPR dalam pemilihan umum multipartai pertama di Indonesia. Disusul pada tanggal 15 Desember 1955 dilakukan pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota Konstituante (lembaga pembuat konstitusi).

Pemilu saat itu dimenangkan empat partai besar PNI (20%), Partai Masyumi (20,9%), Partai NU (18,4 %) dan PKI (16,4%). Hasil bersihnya, partai-partai Islam memperoleh kurang dari 45% suara.

Pelantikan anggota DPR dilakukan pada tanggal 20 Maret 1956 sedangkan pelantikan anggota Konstituante pada tanggal 10 November 1956. Persidangan dalam Konstituante berjalan sangat alot, terutama berkaitan dengan dasar negara. Dari beberapa kali pemungutan suara dalam sidang Konstituante 52% menghendaki dasar negara Pancasila dan 48% menghendaki negara Islam. Karena kedua belah pihak tidak dapat mencapai 2/3 suara sidang tidak berhasil mencapai kata putus hingga Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden tiga tahun kemudian (5 Juli 1959).

15 Februari 1958 Letnan Kolonel Achmad Husein memaklumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) berikut pembentukan kabinetnya dengan Sjafruddin Prawiranegara sebagai perdana menteri. Pemerintahan baru ini mendapat dukungan dari tokoh kharismatis Partai Masjumi Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap serta tokoh PSI Sumitro Djojohadikusumo. Berdirinya pemerintahan tandingan ini didorong oleh masalah otonomi dan serta perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah

yang dinilai tidak adil.

Dua hari kemudian Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah Letnan Kolonel DJ Somba menyatakan putus hubungan dengan Pemerintah Pusat dan mendukung sepenuhnya PRRI. Gerakan ini dikenal dengan nama Piagam Perjuangan Semesta (Permesta). Dan Permesta pun menyerah pada pemerintah pusat pada 29 Mei 1961.

5 Juli 1959 atas desakan Pangab Jenderal AH Nasution, Presiden Soekarno mencetuskan Dekrit Presiden. Isi dekrit itu adalah membubarkan Konstituante, kembali ke UUD 1945 dan pembentukan MPRS.

Dekrit tersebut diterima kalangan Islam, karena pemerintah Soekarno menyatakan kembali ke UUD 1945 yang menggunakan semangat Piagam Jakarta.

17 Agustus 1960 Partai Masjumi terpaksa membubarkan diri setelah mendapat tekanan dari pemerintahan Soekarno, Soekarno kemudian mengeluarkan Kepres No 200/1960 yang meresmikan pembubaran itu. Pembubaran ini dilatarbelakangi penolakan partai ini terhadap konsep kabinet berkaki empat (PNI, Masjumi, NU dan PKI) serta menentang ajaran Soekarno tentang Nasakom.

Pertentangan itu juga diperparah oleh penolakan tokoh-tokoh Partai Masjumi terhadap kebijakan politik Soekarno memberlakukan Demokrasi Terpimpin serta ketidaksukaan Soekarno terhadap sejumlah pimpinan Partai Masjumi yang terlibat PRRI. Menyusul pembubaran Partai Masjumi banyak tokoh Islam yang ditangkap dan dipenjarakan oleh rezim Soekarno. Di antara mereka adalah M Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, As'at, Prawoto Mangkusasmito, Muhammad Roem, Isa Anshary, EZ Muttaqien, Junan Nasution, Kasman Singodimedjo serta Hamka. Sebagian dijebloskan ke penjara karena fitnah PKI.

30 September 1965 terjadi peristiwa dramatis pembunuhan dan penculikan sejumlah perwira tinggi TNI AD yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September (G30S). Belakangan diketahui G30S didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Aksi itu mendapat kecaman dan kutukan dari banyak kalangan. Tanggal 8 Oktober 1965 sebanyak 500 ribu massa bersama 46 orpol dan ormas mengadakan demo besar di Taman Suropati Jakarta, menuntut pembubaran PKI. Tercatat di antara yang demo PII, HMI,

Pemuda Ansor, NU, Muhammadiyah, Perti, Pemuda Muslim, Front Katolik serta GMKI.

25 Oktober 1965 berbagai organisasi mahasiswa anti PKI membentuk wadah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Kemudian diikuti kalangan pelajar dengan membentuk Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), kalangan pemuda dengan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) dan sejumlah kesatuan aksi lainnya.

10 Januari 1966 dengan dipelopori KAMI dan KAPPI, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila memenuhi halaman gedung DPR-GR, mengajukan tiga tuntutan yang kemudian dikenal sebagai Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yang isinya: pembubaran PKI, retool kabinet dan penurunan harga.

12 Maret 1966, dengan berbekal Surat Perintah 11 Maret, Pangkopkamtib Letjend Soeharto menetapkan pembubaran dan pelarangan PKI serta berbagai underbouwnya.

20 Juli - 5 Juli 1966 berlangsung SU MPRS IV. Di antara ketetapannya menegaskan pembubaran PKI serta meminta kepada Presiden Soekarno melengkapi laporan pertanggungjawabannya yang berjudul Nawaksara yang dipandang tidak memenuhi harapan rakyat karena tidak memuat secara jelas kebijakan Presiden mengenai peristiwa G30S beserta epilognya.

7 - 12 Maret 1967 MPRS mengadakan Sidang Istimewa di Jakarta. Salah satu keputusannya adalah mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dipilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden pada SU MPR ke-V tanggal 21-30 Maret 1968 di Jakarta.

20 Februari 1967 berdiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di Jakarta. Organisasi ini didirikan oleh para mantan aktivis Partai Masyumi seperti Moh Natsir, Anwar Harjono, Mohammad Roem dan Prawoto Mangkusasmito, dengan tujuan menggiatkan dan meningkatkan mutu dakwah Islamiyah di Indonesia. Dalam merealisasikan tujuannya, organisasi ini banyak mengirimkan dai ke berbagai pelosok tanah air, hingga ke daerah terpencil seperti Mentawai dan Irian Jaya. Belakangan juga turut mengirimkan da'i ke daerah transmigrasi untuk mengimbangi gerakan kristenisasi.

2 Januari 1974 UU No 1/1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden

RI setelah disetujui oleh DPR. Sebelumnya RUU yang diajukan sejak bulan Juli 1973 ini sempat ditolak oleh kalangan Islam, karena dinilai sebagian isinya bertentangan dengan syariat agama. Dalam RUU itu tercantum pasal yang mensahkan perkawinan melalui kantor catatan sipil, meski tidak berlandaskan syariat agama. RUU itu juga membolehkan perkawinan pasangan yang berbeda agama. RUU kontan ditolak oleh berbagai ormas Islam, berupa demonstrasi penolakan RUU yang konsepnya dirancang CSIS itu. Puncaknya adalah pendudukan ruang sidang DPR oleh sekitar 500 orang pemuda Muslim yang terdiri dari GPI, IPM, IPNU, PII, dan lain-lain yang tergabung dalam wadah Badan Kontak Generasi Pelajar Islam. Menghadapi tolakan keras dari ummat Islam itu akhirnya dalam sidang DPR, wakil pemerintah bersedia menghapus pasal-pasal yang dianggap kontroversial.

15 Januari 1974 di Jakarta terjadi demonstrasi besar pertama kali yang dilakukan mahasiswa terhadap pemerintahan Soeharto. Bermula dari demonstrasi yang menuntut dominasi Jepang, berbuntut pada kerusuhan massal di ibukota negara yang dikenal dengan nama Peristiwa Lima Belas Januari (Malari).

26 Juli 1975 Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan di Jakarta oleh 53 orang ulama dan aktivis dari berbagai ormas Islam, seperti antara lain Muhammadiyah, NU, Al Irsyad Al Washilyah dan Al-Ittihadiyah. Terpilih sebagai Ketua Umum pertama Prof HAMKA. Salah satu fungsi penting yang diemban organisasi ini adalah memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan ummat Islam sebagai amar ma'ruf nahi munkar.

Di awal berdirinya, saat dipimpin ulama kharismatik Buya Hamka, MUI bisa menempatkan diri sebagai organisasi independen dan berwibawa serta menjadi alat kontrol efektif terhadap pemerintah. Hingga sempat menimbulkan hubungan tak harmonis dengan pemerintah Soeharto, terutama berkaitan dengan dikeluarkannya fatwa larangan mengikuti perayaan Natal bagi umat Islam. Buntutnya, Buya Hamka terpaksa mundur dari jabatannya.

Era sesudah itu, MUI relatif dekat dengan pemerintah. Bahkan terkesan menjadi corong pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan nasional seperti kebijakan keluarga berencana (KB) dan ekspor kodok.

Setelah kasus isu lemak babi di tahun 1988 yang meresahkan masyarakat, MUI pada 6 Januari 1989 mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM). MUI juga kemudian memprakarsai berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang diresmikan di Istana Bogor pada tanggal 30 Oktober 1991.

22 Maret 1978 MPR mensahkan Tap MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), meski Fraksi Persatuan Pembangun (FPP) sangat berkeberatan dan sempat melakukan walk out saat dilakukan voting. Sikap PPP ini membuat berang Pemerintah, sehingga Presiden Soeharto menuduh aksi itu sebagai bukti keraguan PPP terhadap kebenaran Pancasila. Selanjutnya Soeharto menginstruksikan ABRI agar waspada kepada pihak-pihak yang meragukan kebenaran Pancasila. Sejak itu Pemerintah gencar mensosialisasikan P4 melalui pelajaran PMP dan penataran-penataran.

Reaksi keras terhadap P4 dan PMP datang dari tokoh-tokoh Muslim, karena dalam implementasinya mengarah pada gagasan sinkretis yang bertentangan dengan aqidah Islam. Buahnya, sejumlah tokoh Islam seperti Abdul Qadir Djaelani dan Tony Ardi dipenjara dengan tuduhan subversif/makar.

27 Maret 1980 dalam Pembukaan Rapim ABRI di Pakanbaru serta dalam Perayaan HUT Kopassandha di Jakarta tanggal 16 April 1980, mulai mengeluarkan gagasan perlunya pemberlakuan asas tunggal Pancasila bagi seluruh kekuatan sosial politik, sekaligus mengajak ABRI meningkatkan kewaspadaan terhadap para pemimpin PPP.

17 Maret 1982 Dirjen Dikdasmen Prof Soedardji Darmoyuwono mengeluarkan Surat Keputusan bernomor 052/C/Kep/D.82 tentang pakaian seragam sekolah, yang melarang penggunaan kerudung atau jilbab bagi siswi Muslimah. Akibatnya, tidak sedikit siswi yang dikeluarkan dari sekolah karena aturan ini, hingga berbuntut gugatan siswa ke pengadilan terhadap pemerintah.

12 September 1984 terjadi peristiwa berdarah yang kemudian disebut Peristiwa Tanjung Priok, di bagian utara kota Jakarta. Peristiwa ini menelan korban jiwa sekitar 400 orang ummat Islam, termasuk pimpinannya bernama Amir Biki, yang dibantai secara keji dengan menggunakan senjata otomatis oleh pihak militer. Peristiwa ini terjadi akibat gejolak politik yang sengaja direkayasa oleh pemerintah untuk

menyudutkan umat Islam dan membuat citra umat Islam terkesan radikal. Bertindak sebagai Pangab/Pangkopkamtib ketika itu Jenderal Leonardus Benjamin Moerdani (Benny Moerdani) dan sebagai Pangdam Jaya Mayjend Try Soetrisno. Kedua tokoh ini sampai sekarang masih melenggang-kangkung, tak terjamah pengadilan.

Lanjutan dari peristiwa ini banyak tokoh Islam ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan subversif, antara lain AM Fatwa, Ir Sanusi, Letjend HR Dharsono, Syarifin Maloko, Abdul Qadir Djaelani, Abu Oesmany Al-Hamidy serta Rahmat Basuki.

8-12 Desember 1984 Nahdhatul Ulama (NU) menyelenggarakan Muktamar NU ke-27 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo yang salah satu keputusannya menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi tersebut. Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Ketua Umum PB NU yang baru pada muktamar kali itu.

Keputusan penting lainnya adalah pernyataan kembali ke Khittah 1926, kembali sebagai organisasi sosial keagamaan dan tidak terlibat politik praktis serta memutuskan hubungan dengan semua partai politik. Yang terkena pukulan telak keputusan itu adalah PPP yang kelahirannya merupakan fusi dari empat partai Islam termasuk Partai NU. Karena sejak itu NU putus hubungan dengan PPP dan anggota NU bebas bergabung dengan partai manapun. Dalam rapat komisi muktamar itu, dari 36 anggotanya hanya ada 2 orang yang mendukung penerimaan asas tunggal Pancasila. Tetapi penolakan itu kandas dalam rapat pleno muktamar. Demikian juga Muhammadiyah dalam Muktamar di Surakarta menerima azas Pancasila.

24 Maret - 1 April 1986 berlangsung pembukaan Kongres HMI ke-16 di Padang. Berbeda dengan saat Kongres HMI ke-15 di Medan yang berhasil menolak pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi itu, pada kongres ini HMI memilih Saleh Khalid sebagai ketua umum dan terpaksa menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasinya demi menjaga kelangsungan hidupnya.

Sebelum kongres ke-16 berlangsung sudah ada lima cabang HMI yang menolak pemberlakuan asas tunggal tersebut dengan membentuk Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) HMI pada tanggal 15 Maret 1986 di Jakarta. Tetapi kelompok ini tidak mendapat izin untuk turut serta dalam kongres di Padang. Menanggapi keputusan kongres tersebut, MPO HMI membuat pengurus PB HMI tandingan

di bawah kepemimpinan Eggy Sudjana pada tanggal 17 April 1986 di Yogyakarta. Selanjutnya, HMI yang menerima asas tunggal disebut HMI Dipo (diambil dari nama Jalan Diponegoro, tempat sekretariat mereka) dan yang menolak asas tunggal disebut HMI MPO.

10 Desember 1987 keluar vonis dari Menteri Dalam Negeri berupa SK Mendagri No 120/1987 yang berisi pelarangan aktivitas Pelajar Islam Indonesia (PII) lantaran ormas pelajar itu menolak mengganti asas organisasinya dari asas Islam menjadi asas tunggal Pancasila sampai tenggat waktu 17 Juni 1987. Sejak itu PII menjadi organisasi terlarang yang bergerak di bawah tanah.

23 Mei 1988 Pemerintah dalam hal ini Mendikbud Fuad Hasan mengajukan RUU Pendidikan Nasional (RUU PN) yang pasal-pasalannya merugikan kepentingan pendidikan Islam, antara lain karena RUU ini tidak mengakui dasar kebebasan untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan swasta, termasuk lembaga pendidikan keagamaan. Dalam RUU ini juga tidak diatur kewajiban penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah, sesuai agama yang dianut anak didik.

Reaksi pertama disampaikan oleh Badan Kerjasama Pondok Pesantren (BKSP) Jawa Barat yang menolak RUU tersebut. Akhirnya RUU itu berhasil disetujui setelah dilakukan koreksi sesuai aspirasi masyarakat.

1989 adalah tahun dimulainya Operasi Jaring Merah oleh di Aceh untuk menumpas aksi pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sekaligus dimulainya Aceh sebagai daerah operasi militer (DOM).

Sejak itu ribuan pasukan TNI tambahan diterjunkan di Bumi Rencong ini untuk memerangi GAM. Aksi militer yang kejam dan melanggar HAM dari kedua belah pihak telah menghasilkan banyak korban rakyat sipil yang tidak bersalah.

Upaya penyelidikan Komnas HAM yang dipimpin Baharuddin Lopa di tahun 1998 menghasilkan data temuan sementara 871 orang tewas di tempat kejadian perkara (TKP) karena tindak kekerasan, 387 orang hilang kemudian ditemukan mati, 550 orang hilang tak diketemukan lagi, 368 orang cedera karena penyiksaan, 120 korban dibakar rumahnya serta 102 orang perempuan diperkosa akibat pelaksanaan DOM selama sembilan tahun (1989-1998). Banyak pihak percaya,

korban sesungguhnya dua atau kali lipat dari temuan itu.

7 Desember 1990 Sekitar 500 orang pakar dan cendekiawan berkumpul di Universitas Brawijaya, Malang, menghadiri Simposium Nasional Cendekiawan Muslim dengan tema “Membangun Masyarakat Indonesia Abad 21”. Puncak dari acara itu adalah terbentuk Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dengan Menristek Prof BJ Habibie sebagai Ketua Umumnya.

Kehadiran ormas ini yang menandakan berakhirnya rasa curiga dan permusuhan pemerintah Soeharto kepada ummat Islam kemudian melahirkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Kalangan Islam yang selama ini dimusuhi oleh Pemerintah, tentu saja mendukung berdirinya ICMI, karena dengan begitu usaha dakwah ummat Islam dapat lebih leluasa bergerak. Dalam usaha mentransformasikan missinya, ICMI mendirikan lembaga kajian bernama Center for Information and Development Studies (CIDES), koran harian Republika, Yayasan Orbit, dan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk).

29 Maret 1998 Sekitar 200 pimpinan lembaga dakwah kampus (LDK) se-Indonesia se usai mengikuti acara forum silaturahmi LDK ke-10 di Universitas Muhammadiyah Malang Jawa Timur mencetuskan Deklarasi Malang sebagai tanda kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Fahri Hamzah dari UI terpilih sebagai ketua umumnya yang pertama.

Beberapa hari sesudahnya KAMMI melakukan gebrakan pertama dengan menggelar Rapat Akbar Mahasiswa dan Rakyat di halaman Masjid Al Azhar Jakarta, menghadirkan sekitar 20 ribu mahasiswa, pelajar, buruh, pedagang, dan ibu-ibu rumah tangga, menuntut pemerintahan Soeharto segera melakukan reformasi sesuai tuntutan mahasiswa.

20 Mei 1998 bertepatan dengan hari kebangkitan nasional, di Istana Negara Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya setelah berbulan-bulan didemo mahasiswa dan diultimatum oleh Pimpinan MPR. Pada hari yang sama Wakil Presiden BJ Habibie dilantik menjadi Presiden RI ke-3, menggantikan Soekarno.

Beberapa hari sebelumnya ribuan mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR/MPR.

26 Juni 1998 Prof Deliar Noer mendeklarasikan berdirinya Partai

Ummat Islam (PUI) sebagai partai pertama yang berasaskan Islam. Sesudah itu menyusul berdiri pula 12 partai Islam lainnya seperti Partai Bulan Bintang (PBB) tanggal 26 Juli 1998, Partai Keadilan (PK) tanggal 9 Agustus 1998, Partai Nahdhatul Ummat (PNU) tanggal 16 Agustus 1998 dan Partai Kebangkitan Ummat (PKU) 25 Oktober 1998.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang di masa pemerintahan Soeharto dipaksa berasastunggal Pancasila, pada muktamarnya yang terakhir kembali kepada asas Islam dan kembali menggunakan lambang Ka'bah.

PB NU memilih tidak mendirikan partai Islam, tetapi mendeklarasikan partai berasaskan Pancasila bernama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Begitu pula Muhammadiyah memilih tidak mendirikan partai, tetapi mengizinkan ketua umum Dr Amien Rais sebagai Ketua Umum partai berasaskan Pancasila bernama Partai Amanat Nasional (PAN).

10 November 1998 berlangsung Sidang Istimewa MPR. Salah satu putusan terpentingnya adalah pencabutan Ketetapan MPR No II/MPR/1978 tentang P4 serta pencabutan Pancasila sebagai asas tunggal orsospol dan ormas.

19 Januari 1999 tepat di hari raya Idul Fitri tahun lalu, di saat kaum Muslim Ambon sedang beristirahat usai bersilaturahmi dengan sanak famili, mendadak warga Muslim di daerah Batu Merah diserbu warga Nasrani bersenjata parang panjang dan panah berapi. Ratusan rumah, pasar, pertokoan dan sarana pendidikan musnah terbakar. Ratusan nyawa melayang, puluhan ribu penduduk mengungsi. Sejak itu kerusuhan menjalar ke seantero pula Ambon. Bahkan kemudian menjalar pula ke pulau-pulau di sekitarnya. Senjata yang digunakan pun sudah berupa senapan mesin dan bom rakitan. Meski Gus Dur dan Megawati telah berkunjung ke sana bulan silam, kerusakan masih belum berhenti juga.

(Irfan S. Awwas)

logo_galery1.gif -

3TL.gif -

Pengkhianatan Atas Islam

oleh Hussein Umar

Perjalanan panjang bangsa ini merebut kemerdekaan sesungguhnya adalah tapak sejarah perjalanan dakwah. Kekuatan yang tumbuh melakukan perlawanan terhadap kolonialisme berabad-abad lamanya, bersumber dari wahyu Risalah: Dinul Islam sumber kekuatan utama mayoritas bangsa, dan mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan yang kita raih: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” (Mukaddimah UUD '45)

Tidak kurang dari tokoh seperti Snouck Hurgronje, penasihat pemerintah kolonial Belanda menyampaikan sarannya kepada pemerintah kolonial Belanda (Dutch Islamic Policy) dengan tujuan mematahkan perlawanan ummat Islam. Antara lain Snouck Hurgronje menyarankan. “Yang harus ditakuti pemerintah (maksudnya pemerintah Belanda, pen) bukanlah Islam sebagai agama, tetapi Islam sebagai doktrin politik. Biasanya dipimpin small-minority yang fanatik, yakni ulama yang membaktikan hidupnya terhadap cita-cita Pan Islamisme. Golongan ulama ini lebih berbahaya kalau pengaruhnya meluas kepada petani di desa-desa. Karena itu disarankan supaya pemerintah bertindak netral terhadap Islam sebagai agama dan sebaliknya bertindak tegas terhadap Islam sebagai doktrin politik.”

Pemerintah Belanda harus menyempitkan ruang gerak dan pengaruh Islam. Hal ini dapat dicapai melalui kerjasama kebudayaan Indonesia Belanda. Ini dapat dimulai dengan memperlambat golongan priyayi yang selalu berdekatan dengan pemerintah, karena kebanyakan menjabat sebagai PAMONG PRAIA. Untuk memperlancar usaha tersebut dengan mendidik golongan priyayi dengan pendidikan barat (lihat. J. Benda: *The Crescent and the Rising Sun*).

Pemerintah harus membantu menghidupkan golongan pemangku adat. Karena mereka ini akan menentang Islam. Pertentangan ini disebabkan lembaga adat dibentuk oleh tradisi lokal, sedangkan Islam bersifat universal. Kondisi ini memudahkan pemerintah kerjasama

dengan Golongan Pemangku Adat.

Dalam menghadapi Perang Aceh, Snouck menasihatkan supaya dijalankan Operasi Militer ke daerah pedalaman dan “menindak secara keras para ulama-ulama yang berada di kampung-kampung serta jangan diberi kesempatan para ulama menyusun kekuatannya dengan membentuk santrinya sebagai pasukan sukarela”. Terhadap “orang Islam yang awam” pemerintah harus meyakinkan bahwa “pemerintah melindungi agama Islam”. Usaha ini harus dijalankan dengan bantuan dari kepala-kepala adat.

Pemerintah harus selalu memisahkan antara Islam sebagai agama dan Islam sebagai doktrin politik. Makin jauh jarak kedua hal tersebut akan mempercepat proses kehancuran Islam.” Alam pikiran Snouck Hurgronje ini menghunjam dalam menjadi dasar bagi strategi melumpuhkan dan memarginalkan kekuatan Islam yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik anti Islam. Sikap ini terus menerus mereka lakukan sejak awal kemerdekaan (18 Agustus 1945) yakni dicoretnya 7 kata (syariat Islam dari UUD '45) hingga reaksi keras mereka menolak RUU Sisdiknas (2003) dengan tujuan menggusur pendidikan agama dari sistem pendidikan nasional. Konsistensi sikap mereka ini mengalir sepanjang sejarah dengan satu tujuan, menjegal aspirasi ummat Islam. Tulisan ini berusaha menelusuri kembali sebagian dari hal tersebut.

Ketika para pendiri Republik ini berhasil merumuskan satu gentleman agreement yang sangat luhur dan disepakati pada tanggal 22 Juni 1945 kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Sesungguhnya Piagam Jakarta inilah mukaddimah UUD '45 yang pertama.

Selanjutnya tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jum'at dan bulan Ramadhan, Indonesia lahir sebagai negara dan bangsa yang merdeka. Hendaknya disadari oleh setiap muslim bahwa Republik yang lahir itu adalah sebuah negara yang “berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari 'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Subhanallah, Allahu Akbar!

Namun keesokan harinya tanggal 18 Agustus rangkaian kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, itu dihapus, diganti dengan kalimat: yang maha esa. Inilah awal malapetaka. Inilah awal pengkhianatan terhadap Islam dan ummat Islam. Tentang hal ini berbagai peristiwa dan wacana terjadi mendahului sebelum apa yang kemudian dikenal dengan “tujuh kata” itu dihapus. Terkait di dalamnya antara lain tokoh-tokoh seperti Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Qahhar Muzakkir, Kasman Singodimejo, Teuku Moh. Hasan, Soekarno. Meskipun usianya hanya sehari, republik yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah Republik yang berdasarkan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Syariat Islam melekat dalam konstitusinya walaupun hanya sehari! Hal ini tertanam di lubuk hati yang paling dalam bagi setiap aktivis dakwah. Masih terngiang ucapan Kasman Singodimejo dalam sebuah perbincangan bahwa beliau merasa turut bersalah karena dengan bahasa Jawa yang halus Beliau menyampaikan kepada Ki Bagus Hadikusumo tokoh Muhammadiyah yang teguh pendiriannya itu untuk sementara menerima usulan dihapusnya 7 kata itu. Kasman terpengaruh oleh janji Soekarno dalam ucapannya, “Bahwa ini adalah UUD sementara, UUD darurat, Undang-undang Kilat. Nanti 6 bulan lagi MPR terbentuk. Apa yang tuan-tuan dari golongan Islam inginkan silahkan perjuangkan disitu.”

Kasman berpikir, yang penting merdeka dulu. Lalu meminta Ki Bagus Hadikusumo bersabar menanti enam bulan lagi. Hatta juga menjelaskan bahwa Yang Maha Esa itu adalah tauhid. Maka tentramlah hati Ki Bagus. Dalam pandangan Ki Bagus hanya Islam-lah agama tauhid. Dalam biografinya Teuku Moh. Hasan pun menulis tentang makna Yang Maha Esa ini sebagai Tauhid.

Namun enam bulan kemudian Soekarno tidak menepati janji. Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak pernah terbentuk. Pemilu yang pertama baru dilaksanakan 10 tahun sesudah proklamasi (1955). Konstituante sebagai lembaga konstitusi baru bekerja pada 1957-1959 (hingga Dekrit 5 Juli 1959). Sementara Ki Bagus Hadikusumo yang

diminta oleh Kasman Singodimejo meninggal dalam penantian.

Tentang hilangnya tujuh kata ini Mr. Moh Roem mengutip ungkapan dalam bahasa Belanda: Menangisi susu yang sudah tumpah !?

Sedang M. Natsir menulis: Tanggal 17 Agustus 1945 kita mengucapkan hamdalah; alhamdulillah menyambut lahirnya Republik sebagai anugerah Allah! Tanggal 18 Agustus kita istighfar mengucapkan astaghfirullah (mohon ampun kepada Allah) karena hilangnya tujuh kata!”

Sesudah Proklamasi kita memasuki (1945-1950) masa kemerdekaan, pasca revolusi, PDRI, penyerahan kedaulatan selanjutnya terbentuknya NKRI melalui mosi integral Mohd. Natsir pada 1950. Selanjutnya kita menerapkan demokrasi parlementer diselingi Pemilu I pada tahun 1955 di bawah Perdana Menteri Burhanuddin Harahap (Masyumi), pemilu yang dinilai paling bersih dan paling demokratis.

Sementara itu di luar Jawa di Aceh yang dijuluki “daerah modal” merasa tidak memperoleh keadilan. Lebih dari itu merasa dikhianati oleh Bung Karno Presiden Republik Indonesia.

Ketika Bung Karno berkunjung ke Aceh di awal kemerdekaan bertemu dengan Tgk. Mohammad Daud Beureueh. Kepada Abu Beureueh, Soekarno menyatakan komitmennya untuk menegakkan Islam dan memberlakukan syariat Islam. Namun kenyataannya, Bung Karno mengkhianati janjinya. Inilah penyebab utama pemberontakan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Tgk. Mohammad Daud Beureueh menelan waktu bertahun-tahun dan menorehkan luka yang dalam di hati rakyat Aceh.

Dalam sidang Konstituante (1957-1959). Baik dalam Panitia Persiapan Konstitusi maupun dalam perdebatan tentang Dasar Negara kalangan Kristen dengan gigih menolak Islam dijadikan dasar ideologi negara, didukung oleh kekuatan nasionalis, sekuler, sosialis, Partai Komunis Indonesia dan lain-lain. Indonesia sesungguhnya merupakan ajang pertarungan ideologi.

Dalam Sidang IV MPRS 1966. Golongan Kristen dengan tegas menolak penafsiran Ketetapan No. XX/MPRS/1966 sebagai ketetapan yang menegaskan bahwa Piagam Jakarta yang menjiwai UUD 1945 itu identik dengan Pembukaan, maka merupakan bagian dari UUD dan berkekuatan hukum. Menurut mereka Piagam Jakarta hanya ditempatkan dalam konsiderans Dekrit 5 Juli 1959, bukan dalam diktum atau keputusan Dekrit itu. Jadi (menurut mereka) Piagam Jakarta itu sama sekali tidak berkekuatan hukum.

Dalam Sidang Istimewa MPRS 1967. Sebelum sidang dimulai ke dalam Badan Pekerja MPRS dimasukkan suatu usul tertulis yang antara lain mengajukan agar kewajiban melakukan ibadah diwajibkan bagi setiap pemeluk agama dan agama resmi adalah agama Islam. Presiden dan Wakil Presiden harus beragama Islam. Usul ini dengan gigih ditolak terutama oleh kalangan Kristen (Surat kabar Suluh Marhaen, 3 Maret 1967).

Dalam Sidang V MPRS 1968. Golongan Kristen dibantu oleh golongan nasionalis atau non Muslim lainnya menolak rumusan Pembukaan dari Rancangan GBHN yang berisi: "Isi tujuan kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dituangkan dalam UUD 1945 yang terdiri dari batang tubuh dilandasi oleh Pancasila serta dijiwai oleh Piagam Jakarta." Mereka menolak rumusan tersebut dengan beralasan bahwa kata "dijiwai" menimbulkan arti seolah-olah Piagam Jakarta adalah jiwa sedangkan UUD 1945 itu tubuhnya. "Secara objektif perkataan 'menjiwai' dalam Dekrit itu harus diartikan sebagian besar dari Piagam Jakarta - kecuali tujuh kata - dimasukkan dalam Pembukaan yang diterima pada tanggal 18-8-1945, dan Pembukaan itu adalah jiwa UUD 1945. Tidak ada jiwa yang lain. Kalau dikatakan oleh sementara pihak, bahwa Piagam Jakarta 'menjiwai' UUD dan bukan Pembukaan yang menjiwainya, itu dapat menimbulkan arti, bahwa justru tujuh kata yang telah dicoret itulah yang 'menjiwai' UUD '45. Jadi hal itu harus ditolak." Demikian antara lain alasan-alasan kalangan Kristen/Katolik.

Sesudah kembali ke UUD '45 melalui Dekrit 5 Juli '59 Bung Karno menindaklanjuti dengan langkah-langkah politik; Membubarkan Konstituante, membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur pembentukan kabinet. Lalu terbentuklah Kabinet Gotong Royong dan melibatkan PKI dalam Kabinet. Kemudian membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) disusul berbagai langkah politik yang repressif. Berakhirlah peran DPR pilihan rakyat (Pemilu 1955) dan berakhir pula demokrasi parlementer. Bung Karno berubah dari seorang demokrat menjadi diktatur. Pancasila diperas menjadi Tri Sila, dari Tri Sila diperas menjadi Eka Sila: Gotong Royong dan Poros Nasakom. Lalu digelorkanlah jargon: Nasakom jiwaku, hancurkan kepala batu!

Terjadilah proses Nasakomisasi di seluruh bidang di bawah Panji-panji Revolusi “yang belum selesai”. PKI mendapatkan ruang bergerak yang sangat terbuka untuk memainkan peran menentukan di panggung politik nasional. Situasi ini baru berakhir dengan terjadinya Peristiwa 30 September 1965 dengan segala akibat-akibatnya.

Jika di masa 1959-1965 Orde Lama Soekarno memaksakan Nasakom, Demokrasi Terpimpin, Paradigma Revolusi, U.U. Subversi, dll, sebaliknya Soeharto meneruskan dengan kemasan baru: Demokrasi Pancasila, P4, Asas Tunggal, PMP, Aliran Kepercayaan, memperkokoh Dwifungsi ABRI (militarisasi di segala bidang kehidupan) plus U.U. Subversi, selama 32 tahun pemerintahannya. Empat pilar Orde Baru : ABRI, Golkar, Birokrasi (Korpri), Konglomerat, menopang pemerintahannya yang repressif. Pemilu yang penuh rekayasa melanggengkan kekuasaannya.

Umat Islam dimarginalkan melalui tahapan: de-ideologisasi (pemaksaan asas tunggal Pancasila); de-politisasi (konsep massa mengambang/floating mass); sekularisasi (antara lain berbagai kebijakan dan konsep RUU yang sangat mengabaikan agama); akhirnya bermuara pada: de-Islamisasi.

Sosok Ali Murtopo, Sudjono Humardani, Bakin pada 1970-an

memainkan peran utama di panggung pertarungan politik nasional. Bersaing dengan perwira-perwira tinggi lainnya Ali Murtopo menjadi “bintang” di dukung oleh institusi strategis sebagai think-tank yakni CSIS yang pada masa itu di dominasi oleh intelektual Katolik dari ordo Jesuit yang sangat anti Islam.

Berbagai jebakan sebagai bagian dari skenario (operasi-operasi) intelijen digelar untuk kemudiannya mereka yang dilibatkan dikorbankan. Komando Jihad, Woyla, Cicendo, Lampung, Haur Koneng, Tanjung Priok dan lain-lain tidak terlepas dari rekayasa intelijen. Beberapa tokoh ex D.I. (Darul Islam) Jawa Barat dirangkul dan diberi berbagai fasilitas. Ada yang diberi pom bensin, perkebunan teh, ada yang diangkat sebagai deputi kerohanian Bakin. Namun sesudah itu satu persatu diringkus dijebloskan kedalam penjara dengan berbagai tuduhan. Semua tuduhan itu fitnah. Kalangan intelijen mempunyai permanent issue antara lain: ekstrim kanan. Untuk menunjukkan kebenaran adanya kelompok ekstrim kanan, direkayasa berbagai peristiwa. Padahal semua itu bagaikan “hujan buatan” (rekayasa intelijen).

Di akhir periode pemerintahannya ada indikasi Soeharto ingin memperbaiki hubungan dengan ummat Islam dimulai dari berdirinya ICMI pada 1990, U.U. Peradilan Agama, U.U. Sistem Pendidikan Nasional (1989), Bank Muamalat dan kebijakan politik lainnya.

Namun prahara Krisis moneter menjadi awal malapetaka, berkembang menjadi krisis ekonomi, menyusul krisis politik dan berakhir dengan krisis kepemimpinan nasional. Akhirnya tekanan dahsyat demonstrasi mahasiswa yang menginginkan reformasi menumbangkan pemerintahan Soeharto sebagaimana tumbangnya pemerintahan Soekarno. Selanjutnya berturut-turut tampil Habibie, Gus Dur dan Megawati.

Dari perjalanan panjang bangsa ini mampukah kita mengambil hikmah dari sejarah? Menempatkan Islam dan Ummat Islam dalam posisi yang bermartabat? Ataukah kita akan terperosok di lubang yang sama berkali-kali? Wallahu a’lam.***

ABDUL GAFFAR ISMAIL : Menempuh Jalan Uzlah

Catatan tentang Allahu yarham Abdul Gaffar Ismail ini disalin sepenuhnya, tidak diubah ejaan maupun tulisannya, dari majalah tengah bulanan *Daulah Islamyah* pada edisi Agustus 1957. Majalah ini dipimpin oleh KH. Isa Anshary, sedangkan tulisan tentang KH. A. Gaffar Ismail ditulis oleh Tamar Djaya, salah seorang karibnya. Redaksi majalah ini terbilang tokoh-tokoh terkemuka Muslim Indonesia. A. Hassan masuk dalam jajaran redaktur, begitu juga nama-nama lain seperti Moenawar Chalil, Rusjad Nurdin, Gaffar Ismail sendiri dan juga Rahmah el Yunusiyah. Berikut salinannya:

Siapa yang tak mengenal A. Gaffar Ismail dalam perjuangannya Islam? Salah seorang tokoh politik dalam barisan kita yang telah berjuang sedjak puluhan tahun lampau, tidak pernah berhenti dari tugasnya memimpin ummat. Setelah seperempat abad ia berjuang dimedan politik, akhirnya karena merasa ketjewa dengan djalannya partai yang dianutnya, mengambil djalan sendiri diluar kepartaian. Sekarang Gaffar Ismail aktif memberikan kulijah agama, merupakan tjeramah-tjeramah tasauf dan kerohanian yang mendalam di beberapa tempat penting di Indonesia, yang diikuti oleh puluhan ribu ummat Islam. Lapangan ini merupakan lahan tersendiri yang ditjiptakannya, dan dengan mengambil djalan ini, ia merasa dirinya lebih berhasil membentuk djiwa ummat daripada aktif dalam partai yang dianggapnya tidak murni lagi.

Ia sekarang bertempat tinggal di Pekalongan. Setiap malam tertentu ia memberikan tjeramah agama di beberapa tempat dikota ini, terutama di Pekadangan yang terkenal perkembangan kaum muslimin yang thaat. Berpuluh ribu kaum muslimin menjadi pengikut kulijahnya. Makin lama, makin ramai dan makin menarik. Sekali seminggu ia ke Surabaya memberikan kulijah agama dalam bentuk yang sama, yang didukung oleh puluhan ribu kaum muslimin, terutama dari kalangan intelek Islam. Sekali seminggu pula ia pergi ke Makassar dalam bentuk yang sama, yang juga didukung oleh puluhan ribu kaum

muslimin.

Lapangan ini merupakan satu hal yang baru dalam dunia Islam di Indonesia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Walaupun pernah diadakan oleh organisasi-organisasi Islam berbentuk tabligh atau lainnya, tapi belum pernah mendapat sambutan seperti adanya Gaffar Ismail ini.

Luar biasa dan sangat menarik perhatian. Kaum terpeladjar Islam yang merasa dirinya masih kurang dalam keagamaan apalagi dalam ibadah serta tuntunan rohani ke-Tuhanan, sangat gembira dengan langkah yang diambil Gaffar Ismail ini. Mereka berdujun-dujun mendatangi tjeramah2 agama yang diadakan'Gaffar.

Pada waktu yang akhir2 ini, nama Gaffar Ismail terutama di Djawa Tengah, Djawa Timur dan Sulawesi sangat populer, menjadi buah bibir orang ramai.

Saja rasa buat ketiga daerah itu sekarang, nama Gaffar Ismail terletak dibaris depan sekali diantara sekian banyak nama pemimpin dan ulama yang dipudja mereka.

Mengapa demikian? Memang harusnya demikian. Karena Gaffar Ismail adalah seorang pemimpin yang tahu benar jiwa masyarakat. Sedjak dahulu adalah seorang orator (ahli pidato) yang mahir dan bidjak. Terlalu pandai menyusun kata2 yang indah dan menarik. Disamping itu, ia adalah seorang ulama yang mendalam, ahli pengetahuan Islam dan diwaktu yang akhir2 ini lebih mengutamakan soal-soal tasawuf dan kerohanian. Dia juga seorang pedjuang yang ulet yang tidak pernah melupakan arti "djihad" dalam djiwanja.

Karena itu, djika ia mengambil djalan bertjeramah dimuka pengikutnja, tidaklah mengherankan kalao semua orang terpesona dan tertekun mendengarkan uraian2nja. Seperti dikatakan diatas, kaum intelektual yang paling banyak menjadi pengikutnja sekarang ini, jaitu orang2 yang berilmu dan tjerdas berfikir. Orang2 inilah menjadi 'kadernja yang sedang dibentuknja dengan giat. Dan insja Allah

usahanja ini berhasil memuaskan sekali.

Riwajatnja:

Saja dapat mentjeritakan sedikit riwayat hidupnja dalam pergerakan politik sedjak dahulu sampai sekarang. Dizaman pendjadjahan sebelum proklamasi, orang mengenal PERMI sebagai salah satu partai politik Islam jang radikal jang terpusat di Minangkabau. Empat partai politik jang dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda ialah dua dari partai Islam, dan dua dari partai Nasional. Jaitu PSII dan PERMI, Partindo dan PNI.

Pemimpin2 keempat partai politik ini kemudian dibuang. Jaitu Sukarno dari Partindo ke Ende, Hatta dkk dari PNI ke Digul, H. Djalaluddin Thaib dkk ke Digul dari Permi, dan Sabilal Rasjad dkk dari PSII ke Digul djuga. PERMI jang begitu besar pengaruhnja terutama di Sumatera, adalah buah tjip-taan sdr. Gaffar Ismail bersama Ali Imran Djamil almarhum Jaitu buah dari rnuktamar Sumatera Thawalib tahun 1930 jang mendjelma mendjadi partai PERMI. Disamping tokoh2 PERMI jang lain, A, Gaffar Ismail termasuk tokoh utama dalam Permi. Ketjakapannja terutama ialah mendjadi propagandis partai. Keliantjahan dan ketjakapan berpidato adalah mendjadi miliknja jang asasi. Waktu itu dalam berpidato, ia sedjadjar dengan Muchtar Luthfi. Berapi-api dan menjala-njala.

Kemudian, ia dikirim ke Djawa mendjadi propagandis PERMI, dan disini ia mendjalankan pengaruhnja jang besar, sehingga namanja dalam waktu jang singkat mendjadi populer sekali.

Seketika partai2 politik tersebut tidak mendapat djalan lagi berhiibung adanja -Vergader verbod dari pemerintah kolonial, Gaffar tampil dalam partai baru jang didirikan oleh Dr. Sukiman Partai Islam Indonesia. Ia ikut mendjadi salah seorang tokoh penting dalam partai ini.

Kemudjan setelah proklamasi, Gaffar ikut dalam Masjumi di Djokja Dalam babak pertama, nama Gaffar tetap menduduki tempat penting

dalam partai ini. Memang buat dia sebagai seorang pergerakan dan pedjuang Islam, dirinja sendiri tidaklah begitu dipentingkannya. Ia hidup selalu sederhana dan memadakan apa jang ada. Ia tidak ingin mewah, bahkan seolah-olah lebih suka hidup menderita, menurut jang ditjontohkan Nabi dalam perdjuaan fi Sabilillah ini.

Ia mengabdikan partai setjara bersungguh-sungguh. Ketjakapannya berpidato sangat besar gunanya bagi suatu partai jang menghendaki pembangunan massa. Berdjuaan baginja-bukanlah barang sambilan. Itu, saja ketahuilah benar selama kita bergaul rapat semendjak Permi 1930 dahulu dan sampai waktu jang achir didalam Masjumi.

Tapi dengan adil, saja dapat menilai Gaffar ini, bahwa dia bukanlah seorang organisator. Memimpin partai setjara administratif ia tidak bisa, dan bukanlah tempatnja djika pekerjaan itu diberikan padanja.

Dia dapat dikemukakan mendjadi propagandas dan penggugah semangat rakyat atau pembentuk kader. Kalau ini diberikan kepadanya, insya Allah akan berhasil sebaik-baiknya.

Patah Hati

Suatu kali pada tahun 1953 kami (saja dan Gaffar) berkundjung kerumah sdr Natsir di Djalan Djawa. Sdr. Gaffar mengemukakan pendapatnja mengenai Masjumi. Banyak kritik dilantjarkannya kepada ketua umum Masjumi itu, berdasarkan fakta2 jang djelas. Dia melihat Masjumi “belum merupakan suatu partai perdjuaan jang radikal. Diketjarnya sdr. Natsir jg (karena telah) mentjiptakan Tafsir Asas Masjumi, dimana didalamnja sepatahpun tidak disebut2 kata2 Djihad.

Ia ingin Masjumi itu betu!2 partai Islam jg. kuat dan radikal menentang ideologie jg. hendak menghantjurkan Islam. Ia ingin Masjumi mendjadi pelopor “Negara Islam” di Indonesia. Ia mengemukakan konsepsinja didalam rangka memperhebat tekad perdjuaan. Apabila Masjumi diteruskan dalam tradisinja jang sudah2, dia pertjaja Masjumi akan mengalami kekalahan dan tjita2

jang dikandung tidak akan tertjapai. Berdjam-djam sdr. Gaffar mengada-kan koreksi dimuka Natsir dan saja memperhatikan kedua tokoh itu. Gaffar berkata dengan djiwa jang sebenar-benarnja penuh kelihatan. Bahkan achlr pembijtaraannja menjatakan kepada Natsir kira2 begini, “Saja bersedia untuk apapun djuga dipergunakan dalam djihad fi sabilillah ini. Tugas apapun jang diberikan kepada saja, akan saja kerdjakan.” Gaffar menjerahkan dirinja bulat2 kepada Imam Masjumi Moh. Natsir.

Natsir mendengarkan semua butir2 kata Gaffar dengan termenung. Natsir tidak memberikan djawab apa-apa. Hanja memutar2 rambutaja jang melambai dikening. Djawab tidak ada

la achirnja mengambil keputusan sendiri. Meninggalkan Bogor (tempat tinggalnja waktu itu) dan pergi ke Pekalongan. Disana, telah banjak menanti orang2 jang haus pimpinannja.

Dia mengambil djalan menjendiri (uzlah), dengan tidak melupakan kewadajiban berdjuang. Kalau dengan partai ia tidak bisa dipakai maka ia akan mempergunakan tenaga dan ketjakapannja didalam bidang perdjuangan Islam dalam tempat tertentu. Lebih baik ia menjusun suatu barisan dan membentuk kader dalam lapangan ketjil tapi dapat member hasil, daripada mentjampuri lapangan besar tapi sama sekali tidak produktif.

Setelah Pekalongan, mengikut pula Surabaja dan kemudian Makassar seperti saja katakan diatas. Gaffar merasa puas dengan basil usahanja ini, karena dengan tjara jang dilakukannja ini, ia lebih banjak mendapat hasil. Gaffar menghilang dari permukaan Masjumi, dan Masjumi sendiri seakan-akan tak hendak mau ‘tahu lagi padanja’.

Inilah akibatnja brilliant jang disia-siakan. Dan dia sekarang seolah-olah atjuh tak atjuh sadja lagi dengan Masjumi. Benar usaha Gaffar ini tidak merugikan Masjumi setjara langsung, akan tetapi djika usahanja ini disalurkan didalam rangka perdjuangan Masjumi, tentulah akan lebih menguntungkan.

Salah satu tenaga kuat yang dianggap sepi. Dan bukan Gaffar saja yang telah uzlah (menjendiri) ini, tetapi banyak tenaga2 brilliant lain yang sudah mengambil sikap yang sama dengan Gaffar. Waktu almarhum H. Agus Salim hidup, saya pernah datang ke rumahnya dan menanyakan, kenapa beliau memilih jalan tidak “berpartai” di akhir hidupnya, padahal beliau terkenal seorang pedjuang Islam sedjak dahulu?

Dengan sangat terharu beliau menjawab, “Waktu Masjumi mula2 didirikan, saya adalah Masjumi. Kemudian Masjumi petjah, dengan keluarnya PSII saya mau ditarik menjadi PSII. Sedianja kedua partai itu, bagi saya sama saja, sebab sama2 berdasar Islam. Akan tetapi praktik2 belakangan ini baik Masjumi maupun PSII, sama sekali tidak dapat saya ikuti lagi. Karena itu saya menyatakan diri tidak berpartai saja. Apa boleh buat.”

Alangkah sedihnja utjapan ini. Tokoh pemimpin Islam yang utama, setjara terus terang mengatakan “ketjewa” dengan praktik2 Masjumi dan PSII. Kemudian Jihat pula sikap yang diambil oleh sdr. Wali Al Fatah, bekas Wakil Ketua Masjumi Pusat Djokja, dan bekas anggota Pimpinan Partai Masjumi 1952. Karena merasa ketjewa dengan sikap dan jalannya perjuangan Masjumi, akhirnya menjendiri dan membentuk gerakan baru sendiri yang kini terkenal dengan nama “Hidzbullah”.

Al-Ustaz H.S.S. Djamaan Djamil, seorang ulama dan ahli fikir kita yang juga tidak asing lagi, pun termasuk seorang yang hidup menjendiri, dengan hanya menghadapi murid2nja. Dahulu ia pernah menjadi pemuka dari Muhammadiyah, termasuk ulama yang zuhud dan intelek.

Karena praktik2 partai yang dilihatnja sekarang sudah terlalu djauh njeleweng, akhirnya ia mendirikan perguruan sendiri yang, dinamainja perguruan “Da’wah Is-lamijah” di Tanah Tinggi Djakarta. Satu2nja sekojah Islam yang tetap mempertahankan sistem suraunja, dan mendapat pengaruh yang besar dikalangan ummat Islam Djakarta.

Mungkin para pemuka2 Masjumi jang sekarang menganggap kedjadian2 diatas, sama sekali tidak penting untuk diperhatikan. Pergilah mana jang akan pergi. Tapi satu hal harus kita pikirkan, bahwa djika sehari demi sehari, tokoh2 penting kita apalagi ulama2 kita jang berpengaruh pergi satu persatu, akan bagaimanakah djadinja ini nanti?

Apakah masih dapat djakinkain sekarang partai2 Islam itu benar akan memperdjuangkan Islam, padahal ulama2 jang mengerti Islam-dikesampingkan, dan intelek jang hidjau (masih muda, red) dalam adjaran Islam diimamkan?

Dapatkah ummat Islam ber-IMAM kepada orang2 jang tak mengerti agama? Terserah kepada penganut2 partai jang sekarang.

Menurut jang wadjar, kalau hendak memperdjuangkan Islam, mestilah dipimpin oleh orang2 jang mengerti Islam, bukan sebaliknya. Tjontoh jang diperlihatkan oleh Gaffar Ismail, Wali al Fatah, H.Agus Salim dan S.S. Djamaan saja kira masih banjak lagi dan akan masih terus terdjadi djika partai kita tidak lekas-lekas menjadari kebenaran ini. Pada umumnja dimana partai Islam dipimpin oleh tenaga2 intelek kaum Ulama dikesampingkan, karena dianggap tak mengerti politik. Maka kembalilah Ulama kesuraunja menghadapi murid2nja, dan madjulah partai tanpa; pengaruh dikalangan umat jang banjak, mendjadi partai jang tidak berkaki.

KH.ISA ANSHARI : Khutbah Perlawanan Menjelang Ajal

Ia bergelar Singa Podium. Dijuluki demikian karena kefasihan kemampuan berorasi mampu mengobarkan semangat setiap orang yang mendengarnya. Pemuda yang bertubuh pendek, gemuk dengan bahu yang agak bungkuk ini lahir di Maninjau, Sumatera Barat, 1 Juli 1916. Di usianya yang masih remaja, Isa Anshari telah terjun ke dunia politik. Di kota kelahirannya itu ia sudah menjadi kader PSII dan aktif sebagai mubaligh Muhammadiyah. Seperti halnya para pemuda lainnya, Isa Anshari merantau ke pulau Jawa dan menetap di kota

Bandung. Di kota Kembang inilah ia bertemu dengan Soekarno.

Selain dikenal sebagai pemuda yang taat beragama, aktivitas politiknya makin menggebu-gebu. Di usianya yang muda, ia telah memimpin beberapa organisasi, yaitu Ketua Persatuan Muslimin Indonesia Bandung, Pemimpin Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia Bandung, Sekretaris Partai Islam Indonesia Bandung serta ikut mendirikan Muhammadiyah cabang Bandung. Dalam pergerakan itu, ia bergabung dengan kelompok pemuda yang disebut-sebut radikal, seperti M. Natsir. Aktivitasnya di Persis yang sempat dipimpinnya beberapa periode seakan-akan semakin tersemai subur. Ia juga menjadi anggota Indonesia Berparlemen, Sekretaris Umum Komite Pembela Islam dan pemimpin redaksi majalah *Daulah Islamyah*.

Satu hal yang mencolok dari tokoh yang pernah menjadi pembantu tetap *Pelita Andalas* dan *Perbincangan* ini adalah sikapnya yang tegas. Ia sering dinilai tidak bersikap kompromistis. Tidak mengherankan kalau Herbert Feith menyebutnya dengan figur politisi fundamentalis yang memiliki keyakinan teguh.

Oleh karena itu, pada zaman Jepang, ia telah mengomandoi gerakan Anti Fasis (Geraf), Biro Penerangan Pusat Tenaga Rakyat (Putera) Priangan, memimpin Angkatan Muda Indonesia dan mengorganisasi Majelis Islam yang membentuk kader-kader Islam.

KH. Isa Anshari adalah salah satu pilar yang membangun Persis. Pada tahun 1935-1960 ia sempat menjadi ketua umumnya. Selama memimpin Persis, perannya sangat menonjol. Ia selalu memberikan arahan dan warna bagi organisasi itu. Pidatonya selalu bergelora membuat pandangan yang mendengarkan selalu tertuju kepadanya. Bukan sekali dua kali ia ditegur oleh aparat keamanan karena “garangnya” pidato yang ia sampaikan.

Dalam hal tulis menulis analisisnya cukup tajam. Di antaranya hasil karyanya adalah *Bahaya Merah Indonesia* (1956), *Barat dan Timur* (1948), *Islam Menentang Komunisme* (1956), *Tuntunan Puasa* (1940), *Umat Islam Menghadapi Pemilihan Umum* (1953), dan

lain-lain.

Dalam kancah politik, Masyumi menjadi ladangnya. Bagi para ulama kritis, berpolitik merupakan bagian tuntutan agama. Mereka selalu meneriakkan kebenaran walaupun pahit dirasakan. Bagi mereka, berpolitik adalah alat untuk mencapai cita-cita umat Islam. Di bawah bendera Masyumi, ia semakin memperkuat posisinya sebagai politisi. Tahun 1949, ia memimpin sebuah kongres Gerakan Muslimin Indonesia.

Keterlibatan KH. Isa Anshari dalam pentas politik membuat dia harus menghadapi risiko yang tidak kecil. Ketika terjadi razia terhadap orang-orang yang diisukan ingin membunuh presiden dan wakil presiden pada bulan Agustus 1951 oleh PM Sukiman Wirdjosandjoyo, KH. Isa Anshari ditangkap. Namun beberapa saat kemudian ia dilepaskan dan dinyatakan tidak bersalah.

Sepak terjangnya di bidang politik sempat menyedot perhatian massa. Di mana ia memberikan pidato, pasti dipenuhi massa yang ingin mendengarkan suaranya. Biasanya massa yang hadir bukan hanya partisipan Masyumi, tapi juga masyarakat umum.

Pada masa Soekarno, Masyumi menjadi salah satu lawan politik pemerintah yang terus digencet. Saat tragedi Permesta meledak (1958), banyak tokoh-tokoh yang dicitrak. Termasuk KH. Isa Anshari yang saat itu berada di Madiun bersama Prawotomangkusmito, M. Roem, M. Yunan Nasution dan EZ. Muttaqien serta beberapa tokoh lainnya.

Pada masa demokrasi parlementer, muncul beberapa konflik antar kelompok. Ada yang menginginkan Indonesia berideologi sekuler-nasionalis dengan dasar negara Pancasila. Di sisi lain ada yang menginginkan terbentuknya negara Islam, atau paling tidak negara yang berideologikan hukum-hukum Islam. Di tubuh Masyumi, cita-cita untuk membangun Negara Islam sangat subur. KH. Isa Anshari tetap menjadi juru bicara yang ulet bagi Masyumi. Namun sayang, keinginan mereka untuk mewujudkan Negara Islam gagal.

Ketidakberhasilan ini disebabkan beberapa hal, di antaranya munculnya polarisasi mengenai bentuk dan konsep negara Islam itu sendiri.

Ada yang berpendapat bahwa aturan dan ajaran Islam harus terwujud lebih dahulu yang nantinya dengan sendiri akan terbentuk negara Islam. KH. Isa Anshari termasuk dalam kelompok ini. Di sisi lain ada yang berpendapat bahwa negara Islam harus di bentuk dahulu, baru kemudian diberi corak dan warna Islam. Di Luar itu, muncul kelompok yang lebih keras lagi. Maka meledaklah peristiwa DII/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh serta gerakan Ibnu Hajar di Kalimantan. Gerakan-gerakan itu dapat dipadamkan oleh Soekarno.

Pada era berikutnya, KH. Isa Anshari terus berkecimpung dalam membangun umat. Di usianya yang kian lanjut, ia lebih banyak mengkader generasi muda. Ia tidak lagi menjadi pemimpin di organisasi yang membesarkannya, tapi cukup sebagai penasehat. Begitulah contoh seorang pemimpin yang mengetahui keadaannya. Kendati demikian ia tetap saja mendapat halangan. Ia sempat dijebloskan ke dalam penjara oleh Soekarno. Dari balik terali besi ia masih sempat mengirimkan tulisan-tulisan ke para sahabatnya.

KH. Isa Anshari tidak mengenal lelah. Menjelang akhir akhir hayatnya ia tetap bekerja untuk umatnya. Pada 11 Desember 1969 atau sehari setelah Hari Raya Idul Fitri 1369 H ia meninggal dunia, di RS Muhammadiyah Bandung. Sehari sebelumnya ia menyatakan bersedia memberikan khutbah Idul Fitri, namun takdir berkehendak lain. Naskah khutbah itu sempat diketiknya dua halaman, dan tak sempat terbacakan

MOHAMMAD NATSIR : Kiai Perdana Menteri

PM_Moh_Natsir.jpg -

Negarawan Muslim, ulama intelektual, tokoh pembaruan dan politikus kenamaan, itulah predikat yang bisa disematkan pada tokoh Muslim yang satu ini. Lahir pada 17 Juli 1908, di Alahanpanjang, daerah subur di Sumatera Barat yang kaya dengan aneka pergolakan pemikiran dan gagasan.

Ketika baru berusia 8 tahun, Mohammad Natsir belajar di HIS (Hollandsch Inlandsche School) Adabiyah, Padang dan tinggal bersama makciknya. Kemudian Natsir, dipindahkan o-rang tuanya ke HIS pemerintah di Solok dan tinggal di rumah Haji Musa, seorang saudagar. Di sini ia menerima cukup banyak ilmu. Pada malam hari ia belajar al-Qur'an, sedang paginya belajar di HIS. Tiga tahun kemudian ia dipindahkan ke HIS dan tinggal bersama kakaknya, Rabi'ah.

Pada 1923, ia meneruskan sekolah MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs/setingkat SMP sekarang) di Padang. Di situ ia menjadi anggota JIB (Johg Islamieten Bond) Padang dan bersentuhan langsung dengan gerakan perjuangan. Pada 1927, ia melanjutkan ke AMS (Algemene Middelbare School/ setingkat SMA sekarang) di Bandung. Ketika di MULO dan AMS itulah, ia mendapat beasiswa dari pemerintah Belanda. Selama di AMS, ia sangat tertarik pada ilmu agama. Waktu luangnya digunakan untuk belajar agama di Persatuan Islam (Persis) dengan bimbingan pendiri dan pemimpinya, Ustadz A. Hassan. Lulus AMS pada 1930. Prestasi yang diperolehnya memungkinkannya mendapat beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Sejak di MULO, ia sudah mulai mengenal semangat perjuangan. Ia masuk menjadi anggota kepanduan JIB. Ia pernah menjabat ketua (1928-1932) di JIB cabang Bandung. Minatnya terhadap politik, perhatiannya atas nasib bangsa dan tekadnya untuk meluruskan kesalah pahaman umat akan ajaran agama, telah melibatkan dirinya dalam bidang politik dan dakwah. Hal itu pula yang membuat Natsir muda menolak setiap tawaran beasiswa dari pemerintah Belanda untuk meneruskan pendidikan Fakultas Hukum Jakarta, Fakultas Ekonomi Rotterdam Belanda atau menjadi pegawai pemerintah. Kegiatan politiknya terus berkembang setelah lebih jauh berkenalan dengan tokoh-tokoh gerakan politik seperti H.Agus Salim dan yang lainnya.

Karena kejujurannya dalam perjuangan, pada masa kemerdekaan ia di percaya menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan

Republik Indonesia. Kejujuran itu pula yang mengundang seorang seorang Indonesianis, George McTurnan Kahin berkomentar untuk Natsir. “Dia (Natsir) tidak bakal berpakaian seperti seorang menteri, namun demikian, dia adalah seorang yang amat cakap dan penuh kejujuran; jadi kalau Anda hendak memahami apa yang sedang terjadi dalam republik, Anda sudah seharusnya berbicara dengannya.”

Ya, Natsir tak pernah berpenampilan seperti seorang menteri dalam pengertian modern. Ia selalu tampil dalam balutan busana sederhana, lengkap dengan peci dan sorban putih yang selalu ia lilitkan di lehernya.

Sejak 1932 sampai 1942, M. Natsir diangkat sebagai direktur Pendidikan Islam di Bandung sebagai Kepala Biro Pendidikan Kotamadya Bandung (Bandung Syiakusyo). Dari 1945 sampai 1946 sebagai anggota badan pekerja KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan kemudian menjadi wakil ketua badan ini. Pada 1946 (Kabinet Sjahrir ke-2 dan ke-3) dan 1949 (Kabinet Hatta-1) ia menjadi Menteri Penerangan RI. Dari 1949 sampai 1958 ia diangkat menjadi ketua umum Masyumi. Dalam Pemilu 1956 ia terpilih menjadi anggota DPR. Dari 1956 hingga 1958 ia menjadi anggota Konstituante RI.

Pada 1950-1951 tokoh kita ini mendapat amanah menjadi Perdana Menteri. Hubungannya dengan Presiden Soekamo sempat merenggang selama penyelesaian Irian Barat. Puncaknya terjadi tetelah peristiwa Cikini, November 1957. Waktu itu sebuah granat diledakkan untuk membunuh Soekarno, namun tidak berhasil, dan menewaskan anak-anak sekolah, Meski Natsir tidak ada kaitan sama sekali dengan rencana itu, Soekarno menuduhnya berada di belakang aksi tersebut. Dalam situasi negara yang tidak menentu, Ketua Dewan Banteng Achmad Husein mengultimatum pemerintah, Djuanda agar mengundurkan diri. Pemerintah justru memecat Husein, Simbolon, dan beberapa perwira AD lainnya. Tak lama kemudian Kolonel Acmad Husein mengumumkan berdirinya PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia), dengan M. Natsir sebagai Perdana Menteri.

Setelah peristiwa Cikini, Natsir memang tidak hanya diisolasi, tapi juga terus diganggu, bersama koleganya yang lain, Sjafruddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap. Akhirnya mereka hengkang ke Sumatera Barat. Ketika operasi Angkatan Darat terhadap PRRI pada 25 September 1961, Natsir ditangkap dan dipenjara, dengan tuduhan ikut terlibat PRRI. Sejak 1962 sampai 1966 ia ditahan di Rumah Tahanan Miter (RTM) Keagungan Jakarta.

Di awal rezim Orde Baru, Natsir dibebaskan, tapi ia tetap dilarang berpolitik. Walau demikian, aktifitasnya tidak berhenti, Natsir kemudian aktif pada organisasi Islam Internasional. Seperti pada Kongres Muslim Sedunia (World Moslem Congress) pada 1967 yang bermarkas di Karachi, sebagai wakil presiden. Pada 1969 ia menjadi anggota Rabitah af-Alam al-Islami (World Moslem League) di Mekah. Pada 1976 ia masuk anggota Dewan Masjid Sedunia (al-Majlis al-A'la al-'Alami li al-Masajid) yang bermarkas di Mekah. Sedangkan di Indonesia sejak 1967 sampai dengan masa tuanya, ia dipercaya menjadi ketua DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia).

BUYA HAMKA : Menolak Takluk

Hamka2.jpg -

Nama panjangnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, tapi ia lebih dikenal dengan HAMKA. Seorang ulama yang pernah dilahirkan oleh bangsa Indonesia, yang berpengaruh hingga di kawasan Asia Tenggara. Hamka lahir di Maninjau, Sumatera Barat, 16 Februari 1908, Putra H. Abdul Karim Amrullah. Seorang tokoh pelopor gerakan Islam “Kaum Muda” di daerahnya.

Hamka hanya sempat masuk sekolah desa selama 3 tahun dan sekolah-sekolah agama di Padangpanjang dan Parabek (dekat Bukittinggi) sekitar 3 tahun. Tapi ia berbakat dalam bidang bahasa dan segera menguasai bahasa Arab; yang membuat ia mampu membaca secara luas literatur Arab, termasuk terjemahan dari tulisan-tulisan Barat. Sebagai putra tokoh pergerakan, sejak kecil Hamka menyaksikan dan mendengar langsung pembicaraan tentang pembaruan dan gerakannya melalui ayah dan rekan-rekan ayahnya.

Hamka dikenal sebagai seorang petualang. Ayahnya bahkan menyebutnya “Si Bujang Jauh”. Pada 1924, dalam usia 16 tahun, ia pergi ke Jawa untuk mempelajari seluk-beluk gerakan Islam modern dari H. Oemar Said Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo (ketua Muhammadiyah 1944-1952), RM. Soerjopranoto (1871-1959), dan KH. Fakhfuddin (ayah KH. Abdur Rozzaq Fakhruddin). Kursus-kursus pergerakan itu diadakan di Gedung Abdi Dharmo, Pakualaman, Yogyakarta. Setelah beberapa lama di sana, ia berangkat ke Pekalongan dan menemui kakak ipamya, AR. Sutan Mansur, yang waktu itu menjadi ketua Muhammadiyah cabang Pekalongan. Di kota ini ia berkenalan dengan tokoh-tokoh ulama setempat.

Pada bulan Juli 1925, ia kembali ke rumah ayahnya di Gatangan, Padangpanjang. Sejak itulah ia mulai berkiprah dalam organisasi Muhammadiyah.

Pada Februari 1927, Hamka berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan bermukim lebih kurang 6 bulan. Selama di Makkah, ia bekerja di sebuah percetakan. Pada bulan Juli, Hamka kembali ke tanah air dengan tujuan Medan. Di Medan ia menjadi guru agama pada sebuah perkebunan selama beberapa bulan. Pada akhir 1927, ia kembali ke kampung halamannya.

Pada 1928, Hamka menjadi peserta Muktamar Muhammadiyah di Solo, dan sejak itu hampir tidak pernah absen dalam Muktamar Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Sepulang dari Solo, ia mulai memangku beberapa jabatan, mulai dari ketua bagian Taman Pustaka, ketua Tabligh, sampai menjadi ketua Muhammadiyah Cabang Padangpanjang. Pada 1930, ia diutus oleh Pengurus Cabang Padangpanjang untuk mendirikan Muhammadiyah di Bengkulu. Pada 1931, ia diutus oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah ke Ujungpandang untuk menjadi mubaligh Muhammadiyah dalam rangka menggerakkan semangat menyambut Muktamar Muhammadiyah ke-21 (Mei 1932) di Ujungpandang.

Hamka pindah ke Jakarta pada tahun 1950, dan memulai karirnya sebagai pegawai negeri golongan F di Kementerian Agama yang dipimpin KH. Abdul Wahid Hasyim.

Tahun 1950 itu juga HAMKA mengadakan lawatan ke beberapa negara Arab sesudah menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya. Sepulang dari lawatan ini ia mengarang apa buku roman, yaitu Mandi Cahaya di Tanah Suci, Di Lembah Sungai Nil, dan Di Tepi Sungai Dajah. Sebelumnya Hamka menulis Di Bawah Naungan Ka'bah (1938), Tenggelamnya Kapal van der Wijk (1939), Merantau ke Deli (1940), Di Dalam Lembah Kehidupan (1940), dan biografi orang tuanya berjudul Ayahku (1949).

Ia pernah mendapat anugerah gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar, Kairo. Tentang pengaruhnya, Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia berkata, “ Hamka bukan hanya milik bangsa Indonesia, tapi juga kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara.”

Dalam bidang politik, Hamka menjadi anggota konstituante hasil pemilu pertama 1955. Ia dicalonkan oleh Muhammadiyah untuk mewakili daerah pemilihan Masyumi di Jawa Tengah. Muhammadiyah waktu itu adalah anggota istimewa Masyumi. Dalam sidang konstituante di Bandung, ia menyampaikan pidato penolakan gagasan Soekarno untuk menerapkan Demokrasi Terpimpin.

Setelah Konstituante dibubarkan pada bulan Juli 1959 dan Masyumi dibubarkan setahun kemudian. Hamka pun memusatkan kegiatannya dalam dakwah. Sebelum Masyumi di bubarkan, ia mendirikan majalah tengah bulanan bernama Panji Masyarakat yang menitikberatkan soal-soal kebudayaan dan pengetahuan agama Islam. Majalah ini kemudian dibreidel pada 17 Agustus 1960 dengan alasan memuat karangan Dr. Muhammad Hatta berjudul Demokrasi Kita yang mengkritik konsepsi Demokrasi Terpimpin. Majalah ini baru terbit kembali setelah Orde Lama tumbang, pada 1967, dan HAMKA menjadi pemimpin umumnya hingga akhir hayatnya.

Sebelumnya, pada tanggal 27 Januari 1964, ulama dengan jasa yang besar pada negara ini ditangkap negaranya sendiri. Ia dijebloskan ke dalam penjara selama Orde Lama. Dalam tahan ini pula ia melahirkan

karyanya yang monumental, yakni tafsir Al Azhar.

Hamka pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975. Pada masanya pula, MUI pernah mengeluarkan fatwa yang luar biasa, melarang perayaan Natal bersama. MUI didesak untuk mencabut kembali fatwa tersebut, namun Hamka menolaknya. Ia lebih memilih mengundurkan diri dari jabatannya ketimbang harus mengorbankan akidah. Allah SWT memanggilnya pada 24 Juli 1981. Ulama pejuang yang istiqomah ini dimakamkan di Tanah Kusir, diiringi doa segenap umat Islam yang mencintainya.***

3TR.gif -